

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
TAHUN 2024**



Daftar Isi

KATA PENGANTAR 1

BAB I 2

PENDAHULUAN 2

1. Gambaran Umum Organisasi 2

1.1 Pendahuluan 2

1.2 Susunan Organisasi 3

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 4

1.4 Sumber Daya Manusia 4

1.5 Sumber Daya Keuangan 5

1.6 Sarana dan Prasarana 6

2. Permasalahan Utama 8

2.1 Permasalahan 9

2.2 Upaya Pemecahan Masalah 9

BAB II 12

PERENCANAAN KINERJA 12

2.1. Renstra 12

2.2. Sasaran 13

2.3. Kebijakan 14

2.4. Perjanjian Kinerja 18

BAB III 22

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 23

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 23

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 hingga 2024 27

3.1.3. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja 29

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional 29

3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 33

3.1.6. Realisasi Anggaran 34

BAB IV 45

PENUTUP 45

Lampiran 47



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala karena atas rahmat dan kekuatan yang diberikan kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024. Laporan ini disusun atas dasar kerjasama sekretariat beserta semua bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP ini merupakan bagian komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung jawaban yang bertujuan menginformasikan kinerja yang terukur dan berkesinambungan.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bentuk pertanggung jawaban Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menuju Kapuas Hulu Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Putussibau, Februari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU



USAMNDI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 19670302 199703 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

I. Gambaran Umum Organisasi

1. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan bersih yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, diperlukan pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari KKN dan bertanggung jawab.

Masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggung jawaban atas wewenang yang di embannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat di pertanggung jawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.

Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan *good governance* dalam sebuah organisasi akan menjadi *competitive advantage* bagi penyelenggara di mata publik. Di sisi lain, terselenggaranya *good governance* merupakan indikator terciptanya *clean government*. Sebagai salah satu pilar *good governance*, pertanggungjawaban (*accountability*) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagai organisasi publik menyadari sepenuhnya akan kondisi di atas. Agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu telah mengembangkan mekanisme pertanggung jawaban publik dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan yang disusun merupakan pertanggung jawaban tahunan atas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026.

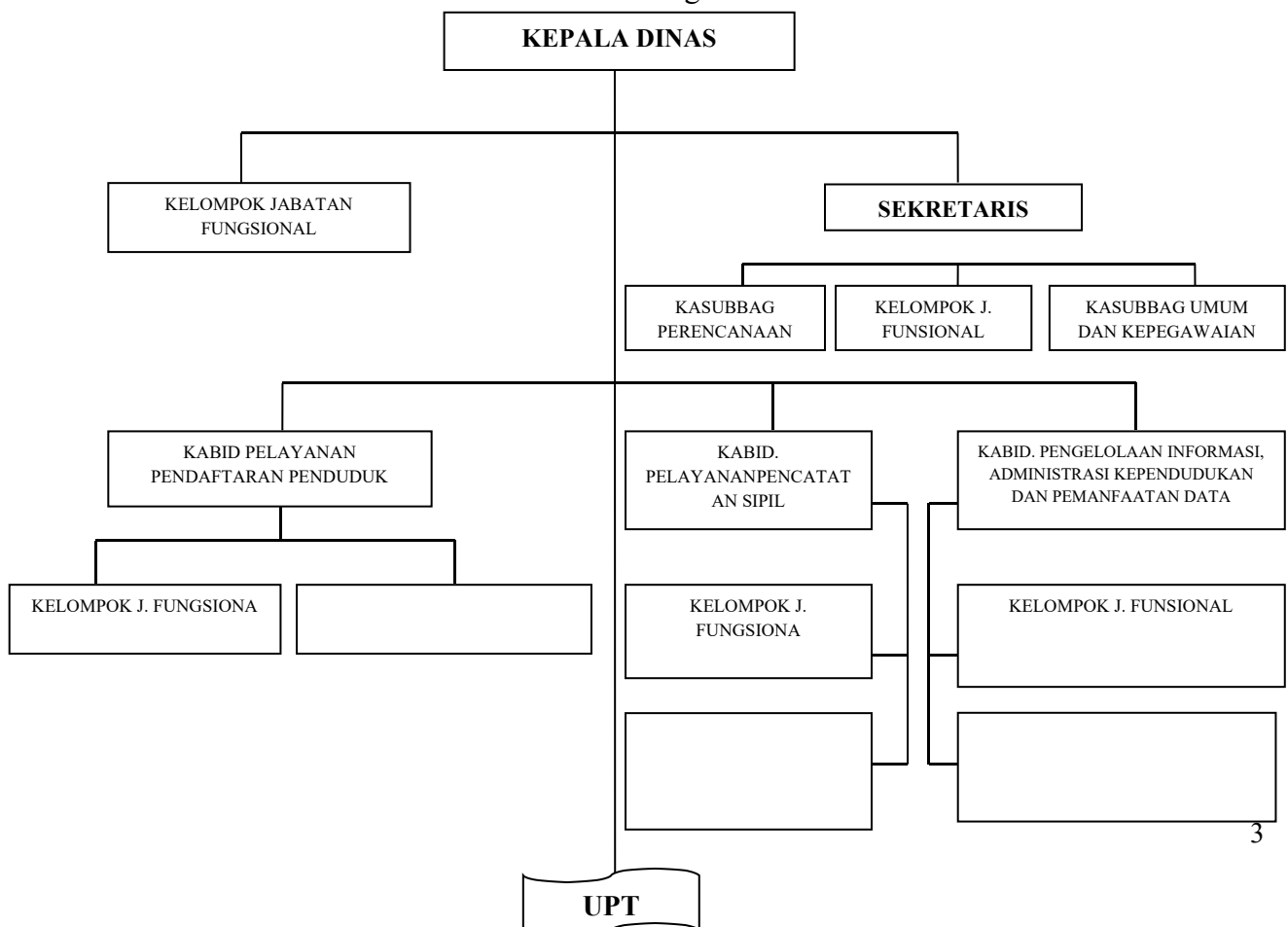
2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT): dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai gambaran terhadap susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat pada bagan/gambar sebagai berikut:

Gambar I
Susunan Organisasi



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi Sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) belum dapat dibentuk mengingat perlu untuk dilakukan pengkajian akademik dan dengan mempertimbangkan aspek kesiapan baik sarana dan prasarana, SDM dan kesiapan teknis lainnya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDM)

Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 61 orang, terdiri dari 6 orang pejabat struktural, 24 orang Jafung dan staf, serta 30 tenaga kontrak. Dengan komposisi berdasarkan golongan, tingkat pendidikan sebagaimana tabel 1 berikut :



Tabel 1

**Jumlah ASN Menurut Golongan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023**

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	4 orang
2	Golongan III	17 orang
3	Golongan II	11 orang
4	Tenaga Kontrak	30 orang
	Jumlah	62 Orang

Selanjutnya kondisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan adalah jumlah ASN yang berpendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 16 orang, Diploma III sebanyak 4 orang dan SMA/SMK sebanyak 8 orang, Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2

**Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan dan Golongan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2024**

No	Pendidikan	I					II					III					IV					Total
		a	b	c	D	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	e	Jml
1	SD/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	SLTA/Sederajat	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	6
4	Diploma (D-I/II/III)	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
5	Sarjana (S1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	6	15	1	1	-	-	-	2
6	Pasca Sarjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
	Total	-	-	-	-	-	2	1	7	-	10	9	2	-	7	18	2	1	1	-	-	4

Sumber : Data Kepegawaian Desember 2024 Dinas DUKCAPIL



5. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui dana alokasi umum sebesar Rp7.306.621.184,- sedangkan pada anggaran perubahan sebesar Rp7.300.674.440 adanya perubahan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian pada Gaji pokok PNS dan Tunjangan Lainnya.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

No.	Uraian	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%
1	2	3	4	5
A.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
B.	BELANJA	7.300.674.440,00	7.150.587.630,00	97,94
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7.300.674.440,00	7.150.587.630,00	97,94
	Belanja Operasi	7.002.695.588,00	6.979.430.052,00	99,67
	- Belanja Pegawai	2.909.575.388,00	2.903.984.309,00	99,81
	- Belanja Barang dan Jasa	4.093.120.200,00	4.075.445.743,00	99,57
	Belanja Modal	675.250.000,00	669.827.000,00	99,20
	a. Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	675.250.000,00	669.827.000,00	99,20
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
	f. Belanja Modal Aset Lainnya			

6. Sarana dan Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu adalah unsur pelayanan teknis di daerah yang membidangi administrasi kependudukan yang secara langsung bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu. Berdasarkan undang-undang dasar 1945 pada hakekatnya pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap

penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.

Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kapuas hulu berpedoman pada undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2006 yang telah di ubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2012 yaitu perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu nomor 7 tahun 2018 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai diantaranya :

a) Mobil Keliling

Mobil Keliling layanan administrasi kependudukan digunakan untuk melaksanakan kegiatan jemput bola pembuatan KTP el, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Akta Pencatatan Sipil dan Perekaman KTP di tempat Sekolah, Kelurahan, Desa-desa dan Dusun sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

b) Ruang Pelayanan di Dinas

Dalam melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menempati sebuah gedung berlantai dua dengan luas 930 m². Ruang pelayanan administrasi kependudukan terletak dilantai satu terdiri atas ruangan pelayanan administrasi kependudukan, ruang pelayanan pencatatan sipil, ruang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan ruang perekaman.

Ruang pelayanan utama dilengkapi dengan loket, nomer antrian, tempat duduk, media televisi dan koran, kotak saran, tempat pengaduan serta fasilitas air minum demi kenyamanan masyarakat selama mengurus dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan :

- ✓ Ruang Laktasi untuk ibu menyusui

- ✓ Ruang Mushola
- ✓ Ram dan Pegangan di sisi gedung untuk memudahkan kaum difabel memasuki ruangan pelayanan
- ✓ Kursi roda
- ✓ Kursi tunggu khusus bagi masyarakat difabel
- ✓ WC khusus bagi masyarakat difabel

c) Pelayanan Online

Dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pelayanan online melalui Layanan Online SELADANG yang bisa diakses oleh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu melalui website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d) Ruang Penyimpanan Arsip

Pada Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menambah sarana gedung/ruangan untuk penyimpanan arsip, sehingga mempermudah pengurus arsip dalam penataan arsip yang masih aktif dan arsip yang sudah tidak aktif. Sehingga tidak terjadi penumpukan arsip di masing-masing bidang serta memberi kenyamanan kepada pegawai dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan.

II. Permasalahan Utama

a. Permasalahan

Lingkungan Internal

- Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia baik dibidang kependudukan dan pencatatansipil masih belum mencukupi baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
- Perlunya Ruang Server dan perlunya aplikasi khusus untuk memonitor kinerja jaringan Keamanan dan sebagai deteksi dini sehingga kendala teknis dalam pelayanan kependudukan di Kecamatan dapat segera di antisipasi.
- Personil untuk Administrator Data base, Networking dan juga HelpDesk SIAK.
- Keadaan dan masalah yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia Aparatur antara lain adalah komposisi, jumlah dan distribusi pegawai belum rasional, kompetensi, disiplin,

kemampuan profesional dan produktivitas sebagian besar ASN belum memadai, dan belum adanya perencanaan SDM yang komprehensif, terintegrasi serta berbasis kinerja.

- Sistem pengukuran kinerja ASN belum dapat mengukur kinerja aktual ASN sehingga belum dapat mencerminkan produktivitas ASN baik secara individu, unit maupun organisasi.

Lingkungan Eksternal

- Kurangnya pemahaman dan kepedulian SDM pengelola jaringan SIAK di tingkat Kecamatan dalam operasionalisasi dan troubleshooting.
- Kendala Jaringan dan geografis wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
- Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, dalam hal ini Pelaporan peristiwa kematian dan Update Data Kependudukan.
- Demografis penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang menyebar hingga kedaerah terpencil sehingga menyulitkan mobilisasi penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan.

b. Upaya Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan upaya pemecahan masalah sebagai berikut :

Lingkungan Internal

- Melaksanakan Bimtek peningkatan kapasitas pemeliharaan jaringan di tingkat kecamatan
- Melaksanakan pemeliharaan Jaringan SIAK secara umum untuk memastikan lancarnya konektivitas pelayanan kependudukan di kecamatan.
- Konsolidasi dan koordinas pelaporan kependudukan secara terus- menerus.
- Dilaksanakannya perbaikan website pelayanan adminduk Pemeliharaan Software, dan Hardware alat pendukung perekaman KTP elektronik secara berkala.
- Melaksanakan Bimtek bagi pegawai serta mengikut sertakan dalam pelatihan Profesional maupun pelatihan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

- Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia sambil melakukan perbaikan-perbaikan.
- Pengajuan anggaran disesuaikan dengan Kebutuhan untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan memperhatikan prioritas program dan sasaran.
- Pengendalian dan Evaluasi mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Sosialisasi Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Lingkungan Eksternal

- Disusunnya Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Peningkatan koordinasi dengan SKPD serumpun sehingga pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilaksanakan secara integrative, terpadu dan menyeluruh.
- Peningkatan pengawasan program/kegiatan di lapangan secara intensif dan berkesinambungan.
- Optimalisasi penggunaan mobil keliling untuk pelayanan yang jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Melaksanakan Pelayanan Jemput Bola ke Kecamatan-kecamatan, Desa-desa, dan Pelayanan terpadu bersama Instansi Pelayanan lainnya.
- Optimalisasi perekaman KTP Elektronik kesekolah-sekolah bagi siswa yang tahun depan akan wajib KTP.
- Komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai yang rasional, beretika, bermoral, disiplin yang tinggi, netral, kompetensi dan kemampuan profesional sesuai dengan tantangan zaman serta produktivitas yang tinggi dan tingkat penghasilan yang wajar sesuai dengan peran, tugas, tanggung jawab, kinerja, dan biaya hidup.
- Kinerja ASN yang dapat diukur melalui sistem pengukuran kinerja yang aktual sehingga dapat mencerminkan produktivitas ASN.
- Gambaran mengenai jenis dan persyaratan kompetensi aparatur, pola karir, serta sistem penghargaan dan sanksi yang jelas; perencanaan karir yang mantap dengan



memperhatikan kemampuan baik manajerial, teknis maupun fungsional, serta kinerja dan produktivitas.

- Manajemen pelayanan publik dilandasi dan diterapkan secara konsisten dengan prinsip-prinsip pelayanan prima dan mengedepankan sikap melayani serta bersih dari unsur KKN melalui sistem akuntabilitas dalam pelayanan publik. Evaluasi kinerja pelayanan publik penting dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Sistem dan proses pengawasan (internal dan eksternal) terkoordinasi dengan baik, transparan dan menjamin adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas DUKCAPIL 2021-2026

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten diharuskan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk:

- 1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan dan masyarakat Kabupaten Kapuas hulu.

- 3) Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

a. Visi

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut mendukung tercapainya visi Kepala Daerah yaitu :

“Menuju Kapuas Hulu Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”

b. Misi

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas”

c. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dalam upaya mendukung misi ke 4 yaitu : Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.2. SASARAN

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Realistic*) dan tepat waktu (*TimeBound*).

Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 adalah :

“Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan”

Untuk menilai keberhasilan pencapaiannya sasaran ini diukur dengan indikator-indikator sebagai tolok ukurnya, yaitu:

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(9)	(9)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Predikat SAKIP	BB	C	C	BB	BB
			Nilai IKM	83	85	85	85	85
			Persentase Kepemilikan KTP- el	100%	100%	100%	99.4%	99.4%
			Persentase Kepemilikan KK	50%	75%	75%	80%	80%
			Persentase Kepemilikan KIA	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	80%	80%	80%	82%	82%

2.3. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Selain itu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan),maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Adapun strategi dan kebijakan yang diterapkan sebagai langkah strategis sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan Renstra DUKCAPIL 2021 -2026 adalah:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
4. Meningkatkan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang berkualitas
5. Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil
6. Membangun/mengembangkan/melengkapi perangkat komputer dan jaringan teknologi informasi.
7. Memelihara perangkat dan jaringan program SIAK agar tetap dapat difungsikan.
8. Mengolah, memelihara, memvalidasi dan mengupdate data base penduduk.
9. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan administrasi Pencatatan sipil melalui monitoring, evaluasi dan analisa.



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Dukcapil	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran2. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran3. Peningkatan profesionalisme aparatur4. Peningkatan capaian realisasi kinerja dan dan ikhtisar realisasi kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas4. Meningkatkan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang berkualitas
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Terselenggaranya Penataan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk peningkatan kepemilikan administrasi kependudukan di masyarakat.3. Meningkatkan sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Memelihara/merawat perangkat dan jaringan program SIAK agar tetap4. Terselenggaranya Penataan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk peningkatan kepemilikan administrasi kependudukan di masyarakat.6. Meningkatkan sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil7. Terselenggaranya Penataan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil8. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk peningkatan kepemilikan administrasi kependudukan di masyarakat.9. Meningkatkan sosialisasi Administrasi Kependudukan dan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil2. Membangun/mengembangkan/melengkapi perangkat komputer dan jaringan teknologi informasi.3. Memelihara perangkat dan jaringan program SIAK agar tetap dapat difungsikan.4. Mengolah, memelihara, memvalidasi dan mengupdate data base penduduk.5. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan administrasi Pencatatan sipil melalui monitoring, evaluasi dan analisa.



		<p>Pencatatan Sipil di 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.</p> <p>10. Memelihara/merawat perangkat dan jaringan program SIAK agar tetap dapat di fungsikan dalam pemrosesan dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil</p> <p>11. Mengintensifkan pengumpulan data laporan kependudukan dan memonitor pelaksanaan sistem administrasi kependudukan baik itu prosedur pendaftaran penduduk maupun Pencatatan sipil ditingkat Kelurahan dan Kecamatan</p>	
--	--	--	--

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kapuas Hulu untuk mewujudkan target kinerja.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja DUKCAPIL Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1. Nilai IKM 2. Persentase Kepemilikan KTP-el 3. Persentase Kepemilikan KIA 4. Persentase Kepemilikan KK 5. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	85 99,4% 80% 100% 82%

Tabel 2.4. Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
	Total Anggaran Belanja	Rp. 7.306.621.184,-	Rp. 7.300.674.440,-
1	Program Penunjang Urusan	Rp. 6.624.064.184,-	Rp. 6.678.117.440,-



	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		
2	Program Pendaftaran penduduk	Rp. 293.405.000,-	Rp. 233.405.000,-
3	Program Pencatatan Sipil	Rp. 269.350.000,-	Rp. 269.350.000,-
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 80.298.000,-	Rp. 80.298.000,-
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 39.504.000	Rp. 39.504.000

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA

A. Sub Program : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Jasa
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Sub Program : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Sub Program : Administrasi Barang Milik Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

D. Sub Program : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
- b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

E. Sub Program : Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g) Penatasahaan Arsip Dinamis pada SKPD

F. Sub Program :Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

- a) Pengadaan Mebel
- b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Sub Program : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

I. Sub Program : Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- b) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
- c) Peningkatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Pendudukan
- d) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

J. Sub Program : Penataan Pendaftaran Penduduk

- a) Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan

3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

K. Sub Program : Pelayanan Pencatatan Sipil

- a) Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
- b) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

L. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- a) Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

M. Sub Program : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

- a) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- b) Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

- a) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota
- b) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

2.6. Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dapat dilihat dari penjabaran dibawah ini:

A. Indikator kinerja :

- : Predikat SAKIP SKPD (BB)**
- : Nilai IKM (90%)**
- : Persentase Kepemilikan KTP el (99,4 %)**
- : Persentase Kepemilikan KIA (80%)**
- : Persentase Kepemilikan KK (100%)**
- : Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (82%)**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- Jumlah anggaran : Rp 6.678.117.440,-
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kapuas Hulu



- Kelompok sasaran : Aparatur Sipil Dinas Dukcapil, Sarana dan Prasarana.
- Realisasi Anggaran : 6.533.054.550,- atau 97,83%

2. Program Pendaftaran Penduduk

- Jumlah Anggaran : Rp 233.405.000,-
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kapuas Hulu
- Kelompok Sasaran : Penduduk wajib KTP - el, Anak kelompok usia di bawah 17 thn (Wajib KIA), Penduduk yang belum memiliki dokumen KK, Penduduk pindah dating, Penduduk Rentan
- Realisasi Anggaran : 232.939.080,- atau 99,80%

3. Program Pencatatan Sipil

- Jumlah Anggaran : Rp 269.350.000,-
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kapuas Hulu
- Kelompok Sasaran : Penduduk yang belum memiliki dokumen akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian,
- Realisasi Anggaran : 265.378.000,- atau 98,53%

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Jumlah anggaran : Rp 80.298.000,-
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kapuas Hulu
- Kelompok sasaran : Perangkat Pelayanan pada Dinas DUKCAPIL, Perjanjian Kersama dengan OPD lain terkait pemanfaatan data kependudukan.
- Realisasi Anggaran : 79.712.000,- atau 99,27%

5. Proram Pengelolaan Profil Kependudukan

- Jumlah Anggaran : Rp 39.504.000,-
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kapuas Hulu
- Kelompok sasaran : Data Anomali, Data Ganda, Data yang tidak terbaca
- Realisasi Anggaran : 39.504.000,- atau 100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini, akan disajikan dua hal penting yang menyangkut kinerja organisasi, yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu . Pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja. Serta data dukung yang memadai melalui Reviu dan monitoring capaian kinerja setiap triwulan dan berdasarkan pada capaian yang ada pada data layanan, Data Agregat Kependudukan dan Profil Kependudukan tahun 2024.

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target dan realisasi indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Ralisasi (%)	Capaian (%)
1. Predikat SAKIP	BB	-	-
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99	93.49	103,88%
3. Persentase kepemilikan	99,4%	99,01%	99,61%



KTP el			
4. Persentase kepemilikan KIA	80%	83,46%	104,33%
5. Persentase kepemilikan KK	100%	99,30%	99,30%
6. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	82%	62,31%	75,99%

A. Predikat SAKIP

Predikat SAKIP yang sudah dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2023 dengan predikat B sedang kan pada tahun 2024 belum dilakukan evaluasi.

B. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024 dengan nilai 93,49. Untuk mendapat nilai Indeks Kepeuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan survey dengan melakukan penyampaian kuisisioner secara langsung ke Masyarakat yang langsung datang ke kantor maupun pelayanan jemput bola ke Kecamatan/ Desa.

C. Peresentase Kepemilikan KTP el

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena pindah datang, rusak atau hilang, serta perubahan status perkawinan bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP.

Pada tahun 2024, Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan target 80% dan realisasi sebesar 99,01% dengan capaian kinerja sebesar 99,61% dengan kategori ***“Sangat Berhasil”***. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP di Kabupaten Kapuas Hulu berjalan sangat baik. Di samping itu, kegiatan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk menerima masukan dan memperbaiki sistem pelayanan administrasi kependudukan juga turut mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

D. Persentase Kepemilikan KIA

Pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan setiap anak Indonesia yang berusia di bawah 17 tahun untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Sejak dikeluarkannya kebijakan KIA lewat Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 tahun 2016, program pembuatan dan kepemilikan kartu identitas anak sudah mulai berlaku secara nasional. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya.

KIA dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama untuk anak yang berumur 0 sampai dengan kurang dari 5 tahun. Sementara itu, jenis yang kedua untuk anak yang berusia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Persentase anak usia 01-16 Tahun yang sudah memiliki KIA dapat dirumuskan sebagai berikut Jumlah Penduduk 0-16 tahun yang memiliki KIA dibagi Jumlah Penduduk 0-16 Tahun.

Pada tahun 2024 kepemilikan KIA dengan target 80% dan realisasi sebesar 83,46% dengan capaian kinerja 104,33% dikategori ***“Sangat Berhasil”***.

E. Persentase Kepemilikan KK

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Nomor Induk Kependudukan, yang

selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) adalah jumlah kepala keluarga yang memiliki KK sampai dengan tahun x dibagi dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah sampai dengan tahun x.

Persentase kepemilikan Kartu Keluarga dengan target 100% dan realisasi sebesar 99,30% dengan capaian kinerja 99,30% dikategori ***“Sangat Berhasil”***. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik juga turut mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Kegiatan ini membuat masyarakat semakin menyadari pentingnya dokumen kependudukan baik KK maupun KTP elektronik yang senantiasa dibutuhkan untuk berbagai macam urusan.

F. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan. Rasio

kepemilikan kutipan akta kelahiran adalah jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun x dibagi dengan jumlah penduduk.

Tahun 2024, target kepemilikan akta kelahiran sebesar 82% sedangkan Persentase Realisasi kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran sebesar 62,31% dengan capaian sebesar 75,99% dikategorikan **“Berhasil”**. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu ditingkatkan lagi pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pembuatan akta kelahiran, baik yang dilakukan secara langsung di Dinas maupun pelayanan rutin yang dilakukan di kelurahan-kelurahan se-Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan hasil capaian ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap harus melakukan peningkatan pelayanan agar target yang sudah ditentukan harus tercapai.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 hingga 2024

Realisasi indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 sampai 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022 sampai 2024

No	Indikator Kinerja Utama	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Persentase kepemilikan KTP el	97,91%	97,15%	99,01%
2	Persentase kepemilikan KIA	66,99%	71,97%	83,46%
3	Persentase kepemilikan KK	99,70%	99,72%	99,30%
4	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	59,16%	61,27%	63,04%

1. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pada tahun 2022 angka Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat memiliki angka realisasi sebesar 97,91%. Angka ini menurun menjadi 97,15% pada tahun 2023. Di tahun 2024, realisasi Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

mengalami kenaikan dan persentasenya sebesar 99,01%. Data di atas menunjukkan bahwa *trend* angka realisasi Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terjadi penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan. Fluktuasi angka realisasi Persentase Penduduk yang memiliki KTP yang mengalami penurunan berhubungan dengan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan wajib KTP pada data agregat kependudukan, disertai juga mobilisasi perpindahan penduduk dan ketersediaan blanko KTP Elektronik yang masih terkait dengan wewenang pemerintah pusat. Sedangkan pada Tahun 2024 terjadi kenaikan tidak terlepas dengan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan jemput bola dan meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya memiliki identitas penduduk

2. Persentase Kepemilikan KIA

Persentase Kepemilikan KIA di tahun 2022 dengan angka realisasi sebesar 66,99%. angka ini menunjukan adanya antusias penduduk untuk memiliki dokumen KIA mengingat akan pentingnya dokumen tersebut. Kemudian pada tahun 2023 Persentase Kepemilikan KIA mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan, yaitu realisasinya sebesar 71,97% dan pada Tahun 2024 sebesar 83,46%. dilihat dari target Nasional pada tahun 2024 sebesar 60% dan realisasi sebesar 83,46% sudah melebihi target tersebut. Ini menunjukkan sebagian besar anak usia 0-16 tahun sudah memiliki KIA.

3. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Pada tahun 2022 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) tercatat memiliki angka realisasi sebesar 99,70%. Lalu pada tahun 2023 naik menjadi 99,72%, kemudian menjadi 99,30% pada tahun 2024. Data di atas menunjukkan bahwa *trend* angka realisasi Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dari tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa program administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Di samping itu, evaluasi program dan kegiatan terkait pelayanan administrasi kependudukan juga membuahkan hasil yang positif.

4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Persentase Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang pada tahun 2022 sebesar 59,16%, Pada tahun 2023 realisasi kinerja tercatat sebesar 61,27%. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan realisasi kinerja walaupun capaian kinerja yang masih di bawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 target kinerja ditetapkan sebesar 82% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 63,04% atau sebanyak 174.623 jiwa dari keseluruhan penduduk sebanyak 276.988. ini menunjukkan bahwa belum memenuhi target yang sudah ditetapkan.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra	Realisasi sampai dengan 2024	Tingkat Kemajuan
1	Predikat SAKIP	A	-	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,9%	93,49%	103,88%
3	Persentase kepemilikan KTP el	100%	99,01%	99,01%
4	Persentase kepemilikan KIA	95%	83,46%	87,85%
5	Persentase kepemilikan KK	100%	99,30%	99,30%
6	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	70%	62,31%	89,01%

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Target Nasional	Realisasi SKPD	Capaian
Pencetakan KTP	%	99,4	99,01	99,61
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun	%	99	99,40	100,40
Penerbitan KIA	%	60	83,46	139,10



IKD	%	30	1,63	5,43
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan OPD	Jumlah	15 OPD	15 OPD	100,00

Pada tahun 2024 pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan beberapa target indikator nasional terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Beberapa target nasional yang ditetapkan meliputi target Kepemilikan KTP Elektronik dan kepemilikan akta kelahiran. Target nasional untuk Perekaman KTP Elektronik sebesar 99,4 dari wajib KTP, sedangkan target nasional untuk kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0 hingga 18 tahun adalah sebesar 99%, target cetak KIA sebesar 60%, target IKD 30% dan Target Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan OPD sebanyak 15 OPD.

Berdasarkan Laporan Kinerja Bulanan dan Data Kabupaten Bersih (DKB) tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan perekaman KTP Elektronik sebanyak 198.687 jiwa penduduknya, sedangkan jumlah wajib KTP tercatat sebesar 200.482 jiwa. Dengan demikian perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 99,01% dengan capaian 99,61% dan sudah melebihi target nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebesar 99%.

Data Konsolidasi Bersih (DKB) tahun 2024 juga mencatat angka kepemilikan akta kelahiran penduduk 0-18 tahun di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 80.683 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia 0-18 tahun adalah sebesar 81.168 jiwa. Dengan demikian kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai angka 99,40% dengan capaian sebesar 100,40%. berdasarkan realisasi tersebut ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melebihi target nasional.

Persentase kepemilikan KIA dengan wajib KIA sebesar 76.503 jiwa dengan persentase cetak KIA sebesar 63.849 jiwa atau 83,46% dengan capaian sebesar 139,10% yang artinya telah melampaui target Nasional yang sebesar 60%.

Sedangkan untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum memenuhi target nasional dengan realisasi sebesar 3234 jiwa atau 1,63% dari total yang memiliki KTP sebanyak 198.498 jiwa.

3.1.5. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja

Dalam beberapa tahun terakhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kenaikan maupun penurunan kinerja yang diukur dengan tingkat capaian kinerja. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel capaian kinerja tahun 2022 hingga tahun 2024 berikut ini:

Tabel 3.4

Capaian Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2022 hingga 2024

No	Indikator Kinerja Utama	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,74%	93,1%	93,49%
2	Persentase kepemilikan KTP el	97,91%	97,74%	99,01%
3	Persentase kepemilikan KIA	85,88%	89,96%	89,96%
4	Persentase kepemilikan KK	99,70%	99,72%	99,30%
5	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	72,15%	74,72%	74,72%

a. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan tabel diatas Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun mengalami kenaikan, ini membuktikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah lebih baik baik dalam melakukan pelayanan maupun kemampuan semua aparatur itu sendiri. Serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga masyarakat merasa puas dalam melakukan kepengurusan dokumen kependudukan dan penacatatan sipil.

Hal ini juga tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah dalam mendukung peningkatan kualitas layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik itu segi anggaran dan pemenuhan sarana dan prasarana.

b. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu *sangat berhasil* ini menunjukkan bahwa pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP di Kabupaten Kapuas Hulu berjalan cukup baik, walaupun dari tabel diatas terjadi penurunan capaian kinerja yang tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk dan mobilisasi perpindahan penduduk serta ketersediaan blanko KTP yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih. Di samping itu, kegiatan pelayanan kepada masyarakat harus tetap di evaluasi baik dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapus Hulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan, baik dengan penambahan sarana dan prasarana serta mutu layanan yang harus ditingkatkan. Dengan capaian ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menerima masukan dan saran supaya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil lebih baik lagi.

c. Persentase Kepemilikan KIA

Tabel 3.4 Persentase Kepemilikan KIA di atas menunjukan capaian kinerja dengan kategori *sangat berhasil*. Ini menunjukan bahwa pelayanan sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan capaian ini tidak lepas dari usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan jemput bola kesekolah-sekolah dan akan terus melakukan koordinasi dan evaluasi dengan pihak terkait seperti pihak sekolah, Rumah sakit/ Klinik bersalin. Kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kapuas Hulu akan terus berupaya meningkatkan pelayanan langsung maupun dengan cara jemput bola, serta melakukan sosialisasi terkait pentingnya KIA sekaligus melakukan PKS terkait penggunaan KIA pada dunia pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi pencapaian target kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sudah melebihi target yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 50%.

Dan ini membuktikan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melakukan upaya semaksimal mungkin agar bisa mempertahankan kinerja yang sudah dicapai.

d. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Dari tabel 3.4 di atas tampak bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kategori *sangat berhasil* ini menunjukkan bahwa program pendaftaran administrasi kependudukan sudah berhasil dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, baik itu secara langsung maupun jemput bola. Dengan keberhasilan ini tidak lepas dari dilaksanakan pelayanan dan sosialisasi melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik juga turut mendukung tercapainya indikator kinerja ini.

e. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran secara keseluruhan dengan kategori *berhasil* ini menunjukkan bahwa berbagai kegiatan percepatan pembuatan akta kelahiran, baik dari segi pelayanan di lokasi-lokasi tertentu, dan akan dilaksanakan pelayanan dengan bentuk kerja sama. Sehingga kedepannya capaian kinerja pada kepemilikan akta kelahiran semakin membaik dengan cara meningkatkan sosialisai serta pelayanan online untuk mengatasi masyarakat yang aksesnya jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, M.BA dalam bukunya *Akuntansi Sektor Publik (1999)*, efisiensi merupakan hubungan antara output barang/jasa yang dihasilkan dari sebuah kegiatan dengan penggunaan sumber daya untuk kegiatan tersebut. Adapun belanja yang berkualitas dapat diukur dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Dengan melihat rasio total belanja tidak langsung terhadap total belanja; dan
- 2) Dengan melihat rasio antara total belanja pegawai dalam belanja langsung dengan total belanja langsung. Semakin kecil angka rasio kedua hal di atas, maka semakin

efisienlah suatu kegiatan belanja daerah. Lebih lanjut hal tersebut tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Belanja (setelah perubahan) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	Belanja Operasi	6.898.532.970,00	6.749.114.940,00	97,83%
	Belanja Pegawai	3.294.660.000,00	3.184.143.925,00	96,65%
	Belanja Barang dan Jasa	3.603.872.970,00	3.564.971.015,00	98,92%
II	Belanja Modal	402.141.470,00	401.472.690,00	99,83%
	a. Belanja modal peralatan dan mesin	170.141.470,00	169.739.000,00	99,76%
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	232.000.000,00	231.733.690,00	99,89%
	Jumlah Belanja	7.300.674.440,00	7.150.587.630,00	97,94%

LRA sampai dengan Desember 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu

3.1.6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu maka dapat dilihat tingkat keberhasilan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan selama tahun 2024 . Adapun secara keseluruhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu mampu menyerap 97,94% dari seluruh dana yang dianggarkan.

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan masing-masing kegiatan tergambar dalam tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6

Capaian Kinerja dan realisasi Keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024



No	Program	No	Rincian Kegiatan	Belanja Langsung		
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
				7.300.674.440	7.150.587.630	97,94%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA			6.678.117.440	6.533.054.550	97,83%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			73.781.100.00	73.781.100.00	99,90%
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.051.100	11.992.120	99,90%
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.350.000	9.342.710	99,51%
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.500.000	5.499.000	99,92%
		4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	14.850.000	14.847.300	99,98%
		5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.700.000	7.700.000	100%
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7.150.000	7.150.000	100%
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.160.000	17.155.120	99,97%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.318.462.000	3.207.941.025	96,67%
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.089.620.000	2.991.163.925	96,81%



		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	205.040.000	192.980.000	94.12%
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.266.000	4.265.100	98,98%
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	7.986.000	7.986.000	99,98%
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.500.000	5.500.000	99,98%
		13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.050.000	6.050.000	99,98%
	Adminstrasi Barang Milik Daerah			5.479.500	5.478.900	99,99%
		14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.570.500	2.570.500	100%
		15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.909.000	2.908.400	99,98%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			66.455.000	66.392.000	99.91%
		16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	61.000.000	61.000.000	100%
		17	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.455.000	5.392.000	98,85%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.192.989.000	1.190.475.938	99,79%
		18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.080.000	11.080.000	100%



		190	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.175.000	72.144.400	99,96%
		20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.015.000	46.959.000	99,88%
		21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.200.000	28.200.000	100%
		22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000	18.000.000	100%
		23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.006.106.000	1.003.679.538	99,76%
		24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.413.000	10.413.000	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			402.141.470	401.472.690	99,83%
		25	Pengadaan Mebel	28.141.470	28.138.000	99,99
		26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142.000.000	141.601.000	99,72%
		27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	232.000.000	231.733.690	99,87%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.474.439.070	1.443.243.547	97,88%
		28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.466.822	16.165.000	98,17%
		29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262.735.320	254.534.147	96,88%
		30	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.158.000	15.158.000	100%



		31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.180.078.928	1.157.386.400	98,08%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			144.390.000	144.363.900	99,98%
		32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.140.000	101.113.900	99,97%
		33	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	43.250.000	43.250.000	100%
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			233.405.000	232.939.080	99,80%
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			233.405.000	232.939.080	99,85%
		34	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	75.053.000	74.921.250	99,82%
		35	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen dan Pendaftaran Penduduk	6.175.000	6.166.330	99,86%
		36	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	144.477.000	144.151.500	99,77%
		37	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	7.700.000	7.700.000	100%



3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			269.350.000	265.378.000	98,53%
	Pelayanan Pencatatan Sipil			171.450.000	167.525.000	97,71%
		38	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	96.700.000	96.675.000	99,97%
		39	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	74.750.000	70.850.000	94,78%
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			97.900.000	97.853.000	99,95%
		40	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	97.900.000	97.853.000	99,95%
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			80.298.000	79.712.000	99,27%
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan			80.298.0000	79.712.000	99,27%
		45	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	16,500.000	16,500.000	100%
		46	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	63.798.000	63.212.000	99,08%
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL			39.504.000	39.504.000	100%



	KEPENDUDUKAN					
	Penyusunan Profil Kependudukan			39.504.000	39.504.000	100%
		47	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	16.788.000	16.788.000	100%
		48	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	22.726.000	22.726.000	100%

Berikut ini adalah uraian dari masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota :

Dana yang tersedia	: Rp.6.678.117.440,00
Sumber Dana	: APBD Kab. Kapuas Hulu
Realisasi	: Rp. 6.533.054.550,00
Sisa Anggaran	: Rp. 145.062.890,00
Porsentase	: 99,83%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 99,83% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut mampu/berhasil, namun masih ada sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar 2,17% menyebabkan prosentase realisasi keseluruhan program tidak maksimal. Dari sisa anggaran yang tidak bisa direalisasikan meliputi belanja Gaji sebesar 3,19% atau sebesar Rp98.456.075, sisanya gabungan dari beberapa sub kegiatan yang ada pada program Penunjang urusan pemerintahan Daerah/ Kota. Sehingga diharapkan pada tahun berikutnya lebih baik lagi.

2. Program Pendaftaran Penduduk

Dana yang tersedia	: Rp.233.405.000,-
Sumber Dana	: APBD Kab. Kapuas Hulu
Realisasi	: Rp.232.939.080
Sisa Anggaran	: Rp.465.920,00
Porsentase	: 99,80%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 99,80% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut realisasinya sudah berhasil dan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Namun masih ada sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.465.920 atau 0,20% ini merupakan sisa belanja perjalanan dinas dan sisa belanja alat tulis kantor. Secara keseluruhannya tidak ada hambatan dan kendala dalam proses realisasi program dan kegiatan ini, diharapkan pada tahun berikutnya bisa dipertahankan dan lebih baik lagi.

3. Program Pencatatan Sipil

Dana yang tersedia	: Rp269.350.000,00
Sumber Dana	: APBD Kab. Kapuas Hulu
Realisasi	: Rp.265.378.000,00
Sisa Anggaran	: Rp. 3.972.000,00
Porsentase	: 98,53%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 98,53% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut realisasinya sudah berhasil. Namun masih terdapat sisa anggaran yang tidak bisa direalisasikan sebesar Rp.3.972.000,- atau sebesar 1,47% ini merupakan sisa belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor dan honorarium tim. Secara keseluruhannya tidak ada hambatan dan kendala dalam menunjang program dan kegiatan pada bidang pencatatan sipil, diharapkan pada tahun berikutnya bisa dipertahankan dan lebih baik lagi.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :

Dana yang tersedia	: Rp.80.298.000,00
Sumber Dana	: APBD Kab. Kapuas Hulu
Realisasi	: Rp.79.712.000,00
Sisa Anggaran	: Rp. 586.000,00
Porsentase	: 99,27%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 99,27% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut realisasinya berhasil. Namun masih terdapat sisa anggaran yang tidak bisa direalisasikan sebesar Rp. 586.000,- atau 0,73% yang merupakan sisa dari belanja perjalanan dinas. Secara keseluruhannya tidak ada hambatan dan kendala dalam menunjang program dan kegiatan pada Bidang PIAK, diharapkan pada tahun berikutnya bisa dipertahankan dan lebih baik lagi.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan :

Dana yang tersedia	: Rp.39.504.000,00
Sumber Dana	: APBD Kab. Kapuas Hulu



Realisasi : Rp.39.504.000,00

Sisa Anggaran : Rp. 0.00,00

Porsentase : 100%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 100% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut realisasinya sudah sangat berhasil dan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Secara keseluruhannya tidak ada hambatan dan kendala dalam menunjang program dan kegiatan pada Bidang PIAK, diharapkan pada tahun berikutnya bisa dipertahankan dan lebih baik lagi.



Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat SAKIP	BB			7.300.674.440	7.150.587.630	97.94	Efisien
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM	90	93,49	103,88				
		Persentase Kepemilikan KTP elektronik	99,4%	99,01%	99,61%				
		Persentase Kepemilikan KIA	80%	83,46%	104,33%				
		Persentase Kepemilikan KK	100%	99,30%	99,30%				
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	82%	63,04%	75,99%				

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Metode pengukuran keberhasilan kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja ini mengacu kepada perbandingan antara rencana dengan realisasi yang dicapai yang kemudian disebut sebagai capaian kinerja. Semakin tinggi capaian kinerja, maka semakin baik pula penilaian kinerja. Nilai capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam penilaian skala ordinal sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Skala Ordinal Penilaian Capaian Kinerja

Nilai capaian kinerja	Kategori
≥ 85	Sangat berhasil
71-84	Berhasil
55-70	Cukup berhasil
≤ 54	Belum berhasil

Dari pembahasan sebelumnya tampak bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 berada pada angka lebih dari 96,62%. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Penilaian Capaian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja utama	2024 (%)	Kategori
1.	Predikat SAKIP	-	
2.	Nilai IKM	103,88%	Sangat berhasil
3.	Persentase kepemilikan KTP el	99,61%	Sangat berhasil
4.	Persentase kepemilikan KIA	104,33%	Sangat berhasil
5.	Persentase kepemilikan KK	99,30%	Sangat berhasil
6.	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	75,99%	Berhasil
RATA-RATA		96,62%	Sangat berhasil

Dari tabel di atas, tampak bahwa secara umum penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024 dapat dikategorikan ***“sangat berhasil”***.

Meskipun demikian dalam usaha untuk mencapai target kinerja yang Kabupaten Kapuas Hulu menghadapi berbagai hambatan, antara lain :

1. Kinerja keuangan dan barang: bahwa pencapaian target dan realisasi pada semua kegiatan terdapat mekanisme pencatatan keuangan dan barang, maka perlu ditingkatkan.
2. Kinerja pelayanan : bahwa dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sudah sesuai dengan Standard Operasi Prosedur, namun masih perlu peningkatan.
3. Sosialisasi tatap muka maupun melalui media perlu ditingkatkan agar pengetahuan masyarakat lebih mengetahui terhadap pentingnya dokumen kependudukan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijadikan acuan bagi penyusunan rancangan program ke depan, serta perlu dikembangkan lagi dalam bentuk yang lebih teknis, masukan saran, dan kritik untuk menyempurnakan laporan kinerja ini masih sangat diharapkan.

Akhirnya atas perhatian kerja sama yang baik serta bantuan yang diberikan dari semua pihak diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu,



USAMNDI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 19670302 199703 1 005



Lampiran :

CAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2024			REALISA SI s/d Tahun 2024	TARGET AKHIR 2024 RENSTR A
				2022	2023	TARGET	REALISASI	% Capaian Kinerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat SAKIP	Predikat	C	B	BB	-	-	B	A
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM	Indeks	93,1	93,1	90	93,49	103,88	93,1	85,9
		Persentase Kepemilikan KTP elektronik	%	97,15%	97,74%	99,4%	99,01%	99,61%	99,01%	100
		Persentase Kepemilikan KIA	%	71,97%	89,96%	80%	83,46%	104,33%	83,46%	90
		Persentase Kepemilikan KK	%	99,72%	99,72%	100%	99,30%	99,30%	99,30%	100
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	61,27%	74,72%	82%	63,04%	75,99%	63,04%	98

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **USMANDI, S.E., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **FRANSISKUS DIAAN**

Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 7 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Bupati Kapuas Hulu,

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kapuas Hulu,

FRANSISKUS DIAAN

USMANDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670302 199703 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Predikat SAKIP	BB
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2. Nilai IKM 3. Persentase Kepemilikan KTP-el 4. Persentase Kepemilikan KIA 5. Persentase Kepemilikan KK 6. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	90 99,4% 80% 100% 82%

No	Program	Anggaran	Sumber Dana	
			APBD	APBN
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kota	6.624.064.184	√	
2.	Program Pendaftaran Penduduk	293.405.000	√	
3.	Program Pencatatan Sipil	269.350.000	√	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	80.298.000	√	
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	39.504.000	√	

Pihak Kedua,

Bupati Kapuas Hulu,



FRANSISKUS DIAAN

Putussibau, 7 Februari 2024

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kapuas Hulu,



USMANDI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670302 199703 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **USMANDI, S.E., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **FRANSISKUS DIAAN**

Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 25 November 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Bupati Kapuas Hulu,

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kapuas Hulu,

FRANSISKUS DIAAN

USMANDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670302 199703 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Predikat SAKIP	BB
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2. Nilai IKM 3. Persentase Kepemilikan KTP-el 4. Persentase Kepemilikan KIA 5. Persentase Kepemilikan KK 6. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	90 99,4% 80% 100% 82%

No	Program	Anggaran	Sumber Dana	
			APBD	APBN
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kota	6.678.117.440	√	
2.	Program Pendaftaran Penduduk	233.405.000	√	
3.	Program Pencatatan Sipil	269.350.000	√	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	80.298.000	√	
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	39.504.000	√	

Pihak Kedua,

Bupati Kapuas Hulu,



FRANSISKUS DIAAN

Putussibau, 25 November 2024

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kapuas Hulu,



USMANDI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670302 199703 1 005

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Predikat SAKIP	BB	B	B
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2. Nilai IKM	90	93,49	103,88%
		3. Persentase Kepemilikan KTP-el	99,4%	99,01%	99,61%
		4. Persentase Kepemilikan KIA	80%	83,46%	104,33%
		5. Persentase Kepemilikan KK	100%	99,30%	99,30%
		6. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	82%	63,04%	75,99%

Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 6.678.117.440,00	Rp. 6.533.054.550,00	
Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 233.405.000,00	Rp. 232.939.080,00	
Program Pencatatan Sipil	Rp. 269.350.000,00	Rp. 265.378.000,00	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 80.298.000,00	Rp. 79.712.000,00	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 39.504.000,00	Rp. 39.504.000,00	
TOTAL	Rp. 7.300.674.440,00	Rp. 7.150.587.630,00	

Dibuat di Putussibau
Pada Tanggal Februari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu,



USMANDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19670302 199703 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	7.300.674.440,00	7.150.587.630,00	97,94	7.103.462.991,00
5.1.	BELANJA OPERASI	6.898.532.970,00	6.749.114.940,00	97,83	6.841.370.991,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.294.660.000,00	3.184.143.925,00	96,65	2.819.697.535,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.187.046.000,00	2.130.935.075,00	97,43	1.814.085.535,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.644.093.000,00	1.602.236.482,00	97,45	1.326.852.264,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.244.514.000,00	1.217.647.396,00	97,84	1.207.368.064,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	399.579.000,00	384.589.086,00	96,25	119.484.200,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	152.862.000,00	149.800.078,00	98,00	129.904.850,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	123.931.000,00	122.206.078,00	98,61	119.020.658,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	28.931.000,00	27.594.000,00	95,38	10.884.192,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	94.852.000,00	92.370.000,00	97,38	98.350.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	94.852.000,00	92.370.000,00	97,38	98.350.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	35.810.000,00	35.280.000,00	98,52	39.600.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	35.810.000,00	35.280.000,00	98,52	39.600.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.744.000,00	49.435.000,00	97,42	37.575.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.939.000,00	26.540.000,00	98,52	29.885.000,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	23.805.000,00	22.895.000,00	96,18	7.690.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	91.937.000,00	89.728.380,00	97,60	81.255.240,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	70.861.000,00	69.668.040,00	98,32	73.433.880,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	21.076.000,00	20.060.340,00	95,18	7.821.360,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.210.000,00	3.162.482,00	98,52	2.750.298,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.210.000,00	3.162.482,00	98,52	2.750.298,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	39.000,00	24.560,00	62,97	21.230,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.000,00	16.394,00	74,52	19.534,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17.000,00	8.166,00	48,04	1.696,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	99.953.000,00	95.715.877,00	95,76	86.722.033,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	80.930.000,00	78.581.045,00	97,10	80.775.527,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	19.023.000,00	17.134.832,00	90,07	5.946.506,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.387.000,00	3.295.566,00	97,30	2.763.661,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.558.000,00	2.498.274,00	97,67	2.489.599,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	829.000,00	797.292,00	96,18	274.062,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.159.000,00	9.886.650,00	97,32	8.290.959,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.672.000,00	7.494.842,00	97,69	7.468.785,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.487.000,00	2.391.808,00	96,17	822.174,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	902.574.000,00	860.228.850,00	95,31	813.212.000,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	902.574.000,00	860.228.850,00	95,31	813.212.000,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	841.574.000,00	799.228.850,00	94,97	795.712.000,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00	17.500.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	205.040.000,00	192.980.000,00	94,12	192.400.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	205.040.000,00	192.980.000,00	94,12	192.400.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	196.200.000,00	184.140.000,00	93,85	185.600.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.840.000,00	8.840.000,00	100,00	6.800.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.603.872.970,00	3.564.971.015,00	98,92	4.021.673.456,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	607.510.900,00	607.261.530,00	99,96	693.096.961,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	607.510.900,00	607.261.530,00	99,96	693.096.961,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	429.000,00	429.000,00	100,00	869.000,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	59.915.000,00	59.906.000,00	99,98	55.360.000,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.430.000,00	2.430.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	32.680.000,00	32.680.000,00	100,00	45.000.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	95.449.400,00	95.414.300,00	99,96	106.322.800,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	190.610.500,00	190.438.430,00	99,91	213.542.761,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	1.800.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	83.308.000,00	83.274.800,00	99,96	128.734.400,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.080.000,00	11.080.000,00	100,00	10.890.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	80.059.000,00	80.059.000,00	100,00	14.610.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.900.000,00	32.900.000,00	100,00	29.004.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	38.708.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	48.256.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.591.681.070,00	1.556.568.447,00	97,79	1.749.244.502,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.545.802.142,00	1.515.482.047,00	98,04	1.676.555.682,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	35.250.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	91.200.000,00	87.300.000,00	95,72	147.420.000,00
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	8.400.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.134.200.000,00	1.116.300.000,00	98,42	1.191.250.000,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	16.200.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00	11.901.228,00	99,18	11.983.992,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	8.335.320,00	8.296.910,00	99,54	4.197.500,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	126.000.000,00	125.956.894,00	99,97	119.990.999,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	116.400.000,00	108.379.115,00	93,11	107.980.220,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	12.266.822,00	11.965.000,00	97,54	13.184.000,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.800.000,00	8.782.900,00	99,81	8.698.971,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	45.878.928,00	41.086.400,00	89,55	44.562.520,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	40.421.488,00	36.032.000,00	89,14	39.250.000,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.425.488,00	2.246.400,00	92,62	2.361.120,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.031.952,00	2.808.000,00	92,61	2.951.400,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	18.126.300,00
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-	-	-	10.878.000,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	-	-	-	7.248.300,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	10.000.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	-	-	-	10.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	43.250.000,00	43.250.000,00	100,00	43.250.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.250.000,00	43.250.000,00	100,00	43.250.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.300.000,00	18.300.000,00	100,00	18.300.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.600.000,00	14.600.000,00	100,00	14.600.000,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.350.000,00	10.350.000,00	100,00	10.350.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	1.361.431.000,00	1.357.891.038,00	99,74	1.536.081.993,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.361.431.000,00	1.357.891.038,00	99,74	1.536.081.993,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	421.431.000,00	420.516.788,00	99,78	434.384.193,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	940.000.000,00	937.374.250,00	99,72	1.101.697.800,00
5.2.	BELANJA MODAL	402.141.470,00	401.472.690,00	99,83	262.092.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.141.470,00	169.739.000,00	99,76	80.492.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	35.141.470,00	35.138.000,00	99,99	35.292.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	28.141.470,00	28.138.000,00	99,99	-
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	16.240.000,00	16.240.000,00	100,00	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.901.470,00	11.898.000,00	99,97	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	11.500.000,00
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	-	-	-	8.500.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	3.000.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	23.792.000,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	-	-	-	23.792.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	135.000.000,00	134.601.000,00	99,70	45.200.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	-	30.000.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	30.000.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	135.000.000,00	134.601.000,00	99,70	15.200.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	135.000.000,00	134.601.000,00	99,70	15.200.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	232.000.000,00	231.733.690,00	99,89	181.600.000,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	232.000.000,00	231.733.690,00	99,89	181.600.000,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	232.000.000,00	231.733.690,00	99,89	181.600.000,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	232.000.000,00	231.733.690,00	99,89	-
5.2.03.01.01.0002.	Belanja Modal Bangunan Gudang	-	-	-	181.600.000,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.300.674.440,00)	(7.150.587.630,00)	97,94	-

No. URUT	NAMA / TEMPAT, TANGGAL LAHIR	N I P	ESELON	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		BERKALA	KENAIKAN	LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA	CATATAN MUTASI PEGAWAI	KET	
				GOL / RUANG	TMT	NAMA	TMT SK JABATAN	THN	BLN			NAMA	THN	JUMLAH JAM	NAMA	LULUS TAHUN	IZAJAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	USMANDI, S.E. M.M NANGA BUNUT, 02-03-1967	19670302 199703 1 005	II B	Pembina Utama Muda IV/c	01/04/2018	Kepala Dinas	13/10/2017	25	10	01/03/2023		DIKLAT PIM III	2007	360	S-2 MAGISTER MANAJEMEN	2005	S-2	57 6 BULAN	Humas dan Protokol Sekretariat Daerah	AKTIF	
2	ASROL JADID, S.Sos PUTUSSIBAU, 06-03-1968	19680306 199303 1 008	III A	Pembina Tk. I IV/b	01/04/2020	Sekretaris	20/12/2019	27	10	01/03/2023		DIKLAT PIM III	2011	360	S-1 ADM. NIAGA (BISNIS)	2001	S-1	56 6 BULAN	Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Pengelolaan Perbatasan	AKTIF	
3	WALIDAD, S.E PUTUSSIBAU, 08-08-1972	19720808 200604 1 009	III B	Pembina IV/a	01/06/2022	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20/12/2019	20	3	01/04/2023		DIKLAT PIM IV	2015	282	S-1 MANAJEMEN	1998	S-1	52 1 BULAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	AKTIF	
4	NATALIA SIMPUNG, S.E., M.A.P	19771225 200003 2 003	III B	Pembina IV/a		Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil														AKTIF	
5	ADE AHADI, S.AP. LANIAK, 12-06-1977	19770612 199803 1 005	III B	Penata Tk. I III/d	01/04/2022	Kabid Pengkolan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	04/05/2023	21	6						S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	2009	S-1	47 3 BULAN	Kepala Subbagian Umum dan Aparatur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	AKTIF	
6	ISNAINI SEMUNTAL, 15-2-1969	19690215 199003 1 007	IV A	Penata Tk. I III/d	01/10/2017	Kasubbag Program	09/01/2017	27	11	01/03/2023		DIKLAT PIM IV	2008	285	SMEA PERKANTORAN	1989	SMEA	55 7 BULAN	Dinas Pertambangan dan Energi	AKTIF	
7	MARDAWATI Z, S.E PUTUSSIBAU, 28-08-1972	19720828 199403 2 010	IV A	Penata Tk. I III/d	01/04/2019	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja		23	11	01/03/2023		DIKLAT PIM IV	2015	285	S-1 SARJANA EKONOMI	2007	S-1	52 1 BULAN	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	AKTIF	
8	RAMSES SIMAMORA, S.H HUMBAHAS, 12-07-1968	19680712 199303 1 014	IV A	Penata Tk.I III/d	01/03/2024	Andministrator Database Kependudukan Ahli Muda		26	6	01/03/2024					S-1 HUKUM			56 2 BULAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	AKTIF	
9	ATENG SULASTYO, A.Md.,S.Sos. PUTUSSIBAU, 27-11-1980	19801127 200604 1 012	IV A	Penata Tk.I III/d	01/04/2022	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		14	5						S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA	2014	S-1	43 10 BULAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	AKTIF	
10	MUHAMMAD YUSRI, S.E JONGKONG HILIR, 06-06-1981	19810606 201101 1 004	IV A	Penata Tk.I III/d	01/04/2019	Analisis Kebijakan Ahli Muda		11	10	01/01/2023					S-1 AKUNTANSI	2004		43 3 BULAN	Pemberdayaan Perempuan dan KB	AKTIF	
11	ANA, S.E NGAUNG KERUH, 20-08-1979	19790820 201101 2 006	IV A	Penata Tk.I III/d	01/04/2019	Analisis Kebijakan Ahli Muda				01/01/2023							2008	S-1	45 1 BULAN		AKTIF
12	KRISTINA AYANG SEKADAU, 14-04-1971	19710414 199303 2 007		Penata Muda Tk. I III/b	01/03/2024	Pengadministrasian Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak		26	6	01/03/2024					SMEA	1991	SLTA	53 5 BULAN	Dinas Kependudukan Transmigrasi & Sosial	AKTIF	
13	HENDRI NURCAHYO, S.ak NANGA EMPANGAU, 28-04-1988	19880428 201101 1 003		Penata Muda Tk. I III/b		Peneleah Teknis Kebijakan		10	1	01/01/2023					S-1 AKUNTANSI	2010	S-1	36 5 BULAN	Kecamatan Banut Hilir	AKTIF	
14	RIKA SUSANA PONTIANAK, 07-12-1984	19841207 200502 2 004		Penata Muda III/a	01/01/2022	Pengadministrasi Perencanaan dan Program		14	7						S-1 AKUNTANSI		S-1	39 9 BULAN		AKTIF	
15	LILIS SURYANA SEMALAH, 23-08-1983	19830823 200604 2 013		Penata Muda III/a	01/04/2019	Pengadministrasian Perencanaan dan Program		16	10	01/04/2023					S-1 AKUNTANSI	2002	S-1	41 1 BULAN		AKTIF	
16	MORTAR SAMBAS, 02-09-1967	19670902 198602 1 001		Pengatur II/c	01/10/2016	Pengadministrasian Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak				01/02/2024					SMP	1984	SLTP	57 0 BULAN	SMPN 1 Putussibau Utara	AKTIF	
17	JAMILAH NANGA MENTERBAH, 12-03-1979	19790312 201212 2 003		Pengatur II/c	01/04/2017	Pengadministrasian Perkawinan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu		20	10	01/01/2023					MA JRS. IPS	1999	SLTA	43 11 BULAN		AKTIF	
18	KAUNGAN, A.Md KAPUAS HULU, 31-05-1989	19890531 202012 2 011		Pengatur II/c	01/12/2021	Operator SIAK		6	9						D-III KOMPUTER	2012	D.III	35 4 BULAN		AKTIF	
19	MUHAMMAD DWI IRWANSYAH, A.Md SLEMAN, 18-04-1993	19930418 202012 1 008		Pengatur II/c	01/12/2021	Operator SIAK		6	9						D-III KOMPUTER	2015	D.III	31 5 BULAN		AKTIF	
20	DEWIE IRMAYANI PUTUSSIBAU, 10-12-1985	19851210 201407 2 002		Pengatur Muda Tk I II/b	01/01/2022	Pengadministrasi Kependudukan		19	8	01/01/2024					SMA JRS. IPA	2003	SLTA	38 9 BULAN		AKTIF	
21	KHAIRUS SYAHIDIN PUTUSSIBAU, 13-09-1986	19860913 201407 1 001		Pengatur Muda II/a	01/08/2018	Pengadministrasi Kependudukan		15	6	01/08/2024					SMA	2017	SLTA	38 0 BULAN		AKTIF	
22	MURSUANDI PUTUSSIBAU, 05-10-1973	19731005 201407 1 002		Pengatur Muda II/a	01/01/2022	Pengadministrasian Umum		13	8	01/01/2024					SMP	2007	SLTP	50 11 BULAN	Humas Sekretariat Daerah	AKTIF	
23	RESTYANA SULISTYO RINI, S. Kom PUTUSSIBAU, 15-02-1991	19910215 202321 2 037		IX	01/07/2023	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	01/07/2023	1	0						S-1 SISTEM INFORMASI	2012	S-1	33 7 BULAN		AKTIF	
24	DEA UMMY RAHMAMULYA, S. Kom PONTIANAK, 14-01-1998	19980114 202321 2 012		IX	01/07/2023	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	01/07/2023	1	0						S-1 KOMPUTER	2019	S-1	26 8 BULAN		AKTIF	
25	KRIYAN ANDIKA JAYA, S. Kom. KAPUAS HULU, 13-01-1996	19960113 202321 1 003		IX	01/07/2023	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	01/07/2023	1	0						S-1 KOMPUTER	2018	S-1	28 8 BULAN		AKTIF	
26	GREGORIUS YULIANUS TAKE, S.T. KAPUAS HULU, 15-07-1992	19920715 202321 1 020		IX	01/07/2023	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	01/07/2023	1	0						S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2015	S-1	32 2 BULAN		AKTIF	
27	YUSAFAT MARYAN RAMBONANG, S.Kom PUTUSSIBAU, 27-09-1992	19920927 202321 1 028		IX	01/11/2023	Pramata Komputer Ahli Pertama	01/11/2023	0	10						S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2015	S-1	32 0 BULAN		AKTIF	
28	MERRY NURCAHYANI, S.Kom KAPUAS HULU, 06-05-1991	19910506 202421 2 006		IX	01/03/2024	Pramata Komputer Ahli Pertama	01/03/2024	0	6						S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2013	S-1	33 4 BULAN		AKTIF	

No. URUT	NAMA / TEMPAT, TANGGAL LAHIR	N I P	ESELON	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		BERKALA		KENAIKAN	LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA	CATATAN MUTASI PEGAWAI	KET.
				GOL. / RUANG	TMT	NAMA	TMT SK JABATAN	THN	BLN	YANG AKAN DATANG	PANGKAT YANG AKAN DATANG	NAMA	THN	JUMLAH JAM	NAMA	LULUS TAHUN	IZAJAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
29	ABANG RAHMAN, A.Md. PIASAK, 07-11-1990	19900107 202221 1 001		VI	01/01/2023	Pranata Komputer Terampil	01/01/2023	1	8						D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	2014	D-III	33 TAHUN 10 BULAN		AKTIF	
30	HERMANTO, A.Md 	19800301 202321 1 009		IX	01/11/2023	Asisparis		0	10								D-III	TAHUN BULAN		AKTIF	
31	MUHAMMAD ARIF RAHMANSYAH, A.Md PONTIANAK, 10-07-1983	19830710 204241 1 003		VII	01/03/2024	Asisparis	01/03/2024	0	6						D-III TEKNIK MESIN	2004	D-III	31 TAHUN 2 BULAN		AKTIF	
32	LAURENTINUS ANDAS, A.Md PUTUSSIBAU, 02-03-1987	19870203 204241 1 003		VII	01/03/2024	Pranata Komputer Terampil	01/03/2024	0	6						D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	2008	D-III	37 TAHUN 7 BULAN		AKTIF	



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN ANTASARI NO. 07 PUTUSSIBAU 78711

Email: disdukcapil@kapuashulukab.go.id

Website: disdukcapil.kapuashulukab.go.id

REKAPITULASI KEPEMILIKAN KTP ELEKTRONIK
SEMESTER 2 TAHUN 2024

KODE	KECAMATAN	KEPEMILIKAN KTP ELEKTRONIK									%
		WAJIB KTP			MEMILIKI KTP			BELUM MEMILIKI			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
610601	PUTUSSIBAU UTARA	10.514	10.194	20.708	10.435	10.132	20.567	79	62	141	99,32%
610602	BIKA	1.955	1.853	3.808	1.939	1.833	3.772	16	20	36	99,05%
610603	EMBALOH HILIR	2.333	2.203	4.536	2.301	2.179	4.480	32	24	56	98,77%
610604	EMBALOH HULU	2.163	2.061	4.224	2.143	2.046	4.189	20	15	35	99,17%
610605	BUNUT HILIR	3.368	3.278	6.646	3.343	3.265	6.608	25	13	38	99,43%
610606	BUNUT HULU	5.947	5.520	11.467	5.853	5.468	11.321	94	52	146	98,73%
610607	JONGKONG	4.379	4.328	8.707	4.354	4.307	8.661	25	21	46	99,47%
610608	HULU GURUNG	5.553	5.359	10.912	5.500	5.312	10.812	53	47	100	99,08%
610609	SELIMBAU	5.489	5.260	10.749	5.424	5.203	10.627	65	57	122	98,87%
610610	SEMITAU	3.891	3.653	7.544	3.837	3.607	7.444	54	46	100	98,67%
610611	SEBERUANG	4.677	4.320	8.997	4.626	4.268	8.894	51	52	103	98,86%
610612	BATANG LUPAR	2.145	2.167	4.312	2.114	2.145	4.259	31	22	53	98,77%
610613	EMPANANG	1.593	1.489	3.082	1.574	1.473	3.047	19	16	35	98,86%
610614	BADAU	2.890	2.696	5.586	2.862	2.674	5.536	28	22	50	99,10%

KODE	KECAMATAN	KEPEMILIKAN KTP ELEKTRONIK									%
		WAJIB KTP			MEMILIKI KTP			BELUM MEMILIKI			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
610615	SILAT HILIR	8.098	7.555	15.653	8.004	7.460	15.464	94	95	189	98,79%
610616	SILAT HULU	4.761	4.375	9.136	4.723	4.323	9.046	38	52	90	99,01%
610617	PUTUSSIBAU SELATAN	9.554	9.255	18.809	9.457	9.189	18.646	97	66	163	99,13%
610618	KALIS	5.569	5.222	10.791	5.507	5.186	10.693	62	36	98	99,09%
610619	BOYAN TANJUNG	4.951	4.722	9.673	4.896	4.676	9.572	55	46	101	98,96%
610620	MENTEBAH	4.310	3.933	8.243	4.229	3.900	8.129	81	33	114	98,62%
610621	PENGKADAN	3.764	3.609	7.373	3.729	3.590	7.319	35	19	54	99,27%
610622	SUHAID	3.878	3.714	7.592	3.822	3.679	7.501	56	35	91	98,80%
610623	PURING KENCANA	990	944	1.934	976	935	1.911	14	9	23	98,81%
6106	KAB. KAPUAS HULU	102.772	97.710	200.482	101.648	96.850	198.498	1.124	860	1.984	99,01%

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data Kabupaten Bersih Semester 2 Tahun 2024

Putussibau, 03 Februari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu



USMANDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19670302 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN ANTASARI NO. 07 PUTUSSIBAU KODE POS 78711

Email: disdukcapil@kapuashulukab.go.id

Website: disdukcapil.kapuashulukab.go.id

REKAPILASI KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 HARI
SEMESTER 2 TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 HARI									%
		ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 HARI			MEMILIKI KIA			BELUM MEMILIKI KIA			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.	PUTUSSIBAU UTARA	4.079	3.855	7.934	3.493	3.327	6.820	1.006	901	1.907	85,96%
2.	BIKA	700	617	1.317	577	523	1.100	177	155	332	83,52%
3.	EMBALOH HILIR	786	782	1.568	626	614	1.240	285	272	557	79,08%
4.	EMBALOH HULU	635	610	1.245	565	546	1.111	121	102	223	89,24%
5.	BUNUT HILIR	1.280	1.195	2.475	1.128	1.031	2.159	265	273	538	87,23%
6.	BUNUT HULU	2.438	2.336	4.774	2.070	2.049	4.119	643	540	1.183	86,28%
7.	JONGKONG	1.587	1.492	3.079	1.302	1.241	2.543	452	392	844	82,59%
8.	HULU GURUNG	1.933	1.821	3.754	1.603	1.526	3.129	513	477	990	83,35%
9.	SELIMBAU	1.930	1.820	3.750	1.650	1.552	3.202	529	510	1.039	85,39%
10.	SEMITAU	1.611	1.373	2.984	1.284	1.097	2.381	561	493	1.054	79,79%
11.	SEBERUANG	1.594	1.470	3.064	1.270	1.179	2.449	582	555	1.137	79,93%
12.	BATANG LUPAR	745	666	1.411	594	570	1.164	245	187	432	82,49%
13.	EMPANANG	575	522	1.097	472	429	901	142	138	280	82,13%
14.	BADAU	1.068	1.089	2.157	923	935	1.858	235	218	453	86,14%

NO	KECAMATAN	ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 HARI									%
		ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 HARI			MEMILIKI KIA			BELUM MEMILIKI KIA			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
15.	SILAT HILIR	3.463	3.158	6.621	2.746	2.502	5.248	1.263	1.142	2.405	79,26%
16.	SILAT HULU	1.689	1.579	3.268	1.468	1.362	2.830	377	340	717	86,60%
17.	PUTUSSIBAU SELATAN	4.156	3.835	7.991	3.589	3.361	6.950	967	837	1.804	86,97%
18.	KALIS	2.116	1.963	4.079	1.620	1.536	3.156	873	761	1.634	77,37%
19.	BOYAN TANJUNG	2.349	2.124	4.473	2.001	1.813	3.814	598	490	1.088	85,27%
20.	MENTEBAH	1.836	1.743	3.579	1.446	1.396	2.842	600	495	1.095	79,41%
21.	PENGKADAN	1.364	1.284	2.648	1.140	1.079	2.219	391	330	721	83,80%
22.	SUHAIID	1.343	1.337	2.680	1.071	1.101	2.172	448	407	855	81,04%
23.	PURING KENCANA	298	257	555	234	208	442	97	80	177	79,64%
JUMLAH		39.575	36.928	76.503	32.872	30.977	63.849	11.370	10.095	21.465	83,46%

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data Kabupaten Bersih Semester 2 Tahun 2024

Putussibau, 03 Februari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu



USMANDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19670302 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JALAN ANTASARI NO. 07 PUTUSSIBAU 78711
Email: disdukcapil@kapuashulukab.go.id
Website: disdukcapil.kapuashulukab.go.id

REKAPITULASI KEPEMILIKAN KK
SEMESTER 2 TAHUN 2024

KODE	KECAMATAN	KK									%
		JUMLAH KK			KK TERCETAK			KK BELUM CETAK			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
610601	PUTUSSIBAU UTARA	7393	1715	9.108	7.357	1.679	9.036	13	3	16	99,21%
610602	BIKA	1400	329	1.729	1.390	316	1.706	1	-	1	98,67%
610603	EMBALOH HILIR	1698	400	2.098	1.687	384	2.071	4	-	4	98,71%
610604	EMBALOH HULU	1491	442	1.933	1.481	432	1.913	2	-	2	98,97%
610605	BUNUT HILIR	2379	619	2.998	2.372	617	2.989	3	-	3	99,70%
610606	BUNUT HULU	4411	890	5.301	4.383	862	5.245	2	3	5	98,94%
610607	JONGKONG	3257	875	4.132	3.247	861	4.108	4	1	5	99,42%
610608	HULU GURUNG	4190	971	5.161	4.176	953	5.129	5	5	10	99,38%
610609	SELIMBAU	3918	1095	5.013	3.901	1.090	4.991	5	3	8	99,56%
610610	SEMITAU	2891	597	3.488	2.880	588	3.468	4	1	5	99,43%
610611	SEBERUANG	3351	711	4.062	3.346	707	4.053	3	-	3	99,78%
610612	BATANG LUPAR	1508	508	2.016	1.500	497	1.997	2	2	4	99,06%
610613	EMPANANG	1263	284	1.547	1.255	275	1.530	1	1	2	98,90%
610614	BADAU	2169	538	2.707	2.154	527	2.681	4	2	6	99,04%
610615	SILAT HILIR	6090	1070	7.160	6.070	1.048	7.118	6	10	16	99,41%

KODE	KECAMATAN	KK									%
		JUMLAH KK			KK TERCETAK			KK BELUM CETAK			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
610616	SILAT HULU	3442	597	4.039	3.433	584	4.017	2	-	2	99,46%
610617	PUTUSSIBAU SELATAN	6986	1510	8.496	6.949	1.480	8.429	11	6	17	99,21%
610618	KALIS	3926	788	4.714	3.910	772	4.682	4	1	5	99,32%
610619	BOYAN TANJUNG	3814	763	4.577	3.802	751	4.553	4	-	4	99,48%
610620	MENTEBAH	3063	664	3.727	3.045	654	3.699	3	1	4	99,25%
610621	PENGKADAN	2848	599	3.447	2.839	590	3.429	2	1	3	99,48%
610622	SUHAIID	2777	707	3.484	2.762	699	3.461	2	-	2	99,34%
610623	PURING KENCANA	747	179	926	747	172	919	-	-	-	99,24%
6106	KAB. KAPUAS HULU	75.012	16.851	91.863	74.686	16.538	91.224	87	40	127	99,30%

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data Kabupaten Bersih Semester 2 Tahun 2024

Putussibau, 03 Februari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu



USMANDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19670302 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN ANTASARI NO. 07 PUTUSSIBAU 78711

Email: disdukcapil@kapuashulukab.go.id

Website: disdukcapil.kapuashulukab.go.id

REKAPITULASI PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK
SEMESTER 2 TAHUN 2024

KODE	KECAMATAN	PEREKAMAN									%
		WAJIB KTP			PEREKAMAN KTP			BELUM PEREKAMAN			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
610601	PUTUSSIBAU UTARA	10.514	10.194	20.708	10.441	10.142	20.583	73	52	125	99,40%
610602	BIKA	1.955	1.853	3.808	1.939	1.834	3.773	16	19	35	99,08%
610603	EMBALOH HILIR	2.333	2.203	4.536	2.305	2.180	4.485	28	23	51	98,88%
610604	EMBALOH HULU	2.163	2.061	4.224	2.143	2.047	4.190	20	14	34	99,20%
610605	BUNUT HILIR	3.368	3.278	6.646	3.348	3.265	6.613	20	13	33	99,50%
610606	BUNUT HULU	5.947	5.520	11.467	5.855	5.475	11.330	92	45	137	98,81%
610607	JONGKONG	4.379	4.328	8.707	4.356	4.309	8.665	23	19	42	99,52%
610608	HULU GURUNG	5.553	5.359	10.912	5.501	5.315	10.816	52	44	96	99,12%
610609	SELIMBAU	5.489	5.260	10.749	5.428	5.210	10.638	61	50	111	98,97%
610610	SEMITAU	3.891	3.653	7.544	3.841	3.617	7.458	50	36	86	98,86%
610611	SEBERUANG	4.677	4.320	8.997	4.631	4.272	8.903	46	48	94	98,96%
610612	BATANG LUPAR	2.145	2.167	4.312	2.119	2.148	4.267	26	19	45	98,96%
610613	EMPANANG	1.593	1.489	3.082	1.575	1.474	3.049	18	15	33	98,93%
610614	BADAU	2.890	2.696	5.586	2.869	2.675	5.544	21	21	42	99,25%

KODE	KECAMATAN	PEREKAMAN									%
		WAJIB KTP			PEREKAMAN KTP			BELUM PEREKAMAN			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
610615	SILAT HILIR	8.098	7.555	15.653	8.016	7.469	15.485	82	86	168	98,93%
610616	SILAT HULU	4.761	4.375	9.136	4.735	4.333	9.068	26	42	68	99,26%
610617	PUTUSSIBAU SELATAN	9.554	9.255	18.809	9.468	9.194	18.662	86	61	147	99,22%
610618	KALIS	5.569	5.222	10.791	5.511	5.187	10.698	58	35	93	99,14%
610619	BOYAN TANJUNG	4.951	4.722	9.673	4.900	4.679	9.579	51	43	94	99,03%
610620	MENTEBAH	4.310	3.933	8.243	4.232	3.905	8.137	78	28	106	98,71%
610621	PENGKADAN	3.764	3.609	7.373	3.729	3.592	7.321	35	17	52	99,29%
610622	SUHAID	3.878	3.714	7.592	3.827	3.685	7.512	51	29	80	98,95%
610623	PURING KENCANA	990	944	1.934	976	935	1.911	14	9	23	98,81%
6106	KAB. KAPUAS HULU	102.772	97.710	200.482	101.745	96.942	198.687	1.027	768	1.795	99,10%

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data Kabupaten Bersih Semester 2 Tahun 2024

Putussibau, 17 Februari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu



USMANDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19670302 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN ANTASARI NO. 07 PUTUSSIBAU 78711

Email: disdukcapil@kapuashulukab.go.id

Website: disdukcapil.kapuashulukab.go.id

REKAPILASI KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-18 TAHUN
SEMESTER 2 TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN									%
		JUMLAH PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN			MEMILIKI			BELUM MEMILIKI			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.	PUTUSSIBAU UTARA	4.333	4.117	8.450	4.319	4.104	8.423	14	13	27	99,68%
2.	BIKA	746	659	1.405	736	653	1.389	10	6	16	98,86%
3.	EMBALOH HILIR	842	836	1.678	834	830	1.664	8	6	14	99,17%
4.	EMBALOH HULU	677	653	1.330	674	651	1.325	3	2	5	99,62%
5.	BUNUT HILIR	1.357	1.264	2.621	1.352	1.262	2.614	5	2	7	99,73%
6.	BUNUT HULU	2.583	2.479	5.062	2.564	2.467	5.031	19	12	31	99,39%
7.	JONGKONG	1.659	1.570	3.229	1.654	1.565	3.219	5	5	10	99,69%
8.	HULU GURUNG	2.046	1.938	3.984	2.040	1.927	3.967	6	11	17	99,57%
9.	SELIMBAU	2.044	1.949	3.993	2.040	1.945	3.985	4	4	8	99,80%
10.	SEMITAU	1.719	1.456	3.175	1.689	1.430	3.119	30	26	56	98,24%
11.	SEBERUANG	1.702	1.568	3.270	1.685	1.549	3.234	17	19	36	98,90%
12.	BATANG LUPAR	801	728	1.529	797	728	1.525	4	0	4	99,74%
13.	EMPANANG	604	552	1.156	598	544	1.142	6	8	14	98,79%
14.	BADAU	1.129	1.153	2.282	1.120	1.148	2.268	9	5	14	99,39%
15.	SILAT HILIR	3.630	3.340	6.970	3.597	3.310	6.907	33	30	63	99,10%
16.	SILAT HULU	1.782	1.671	3.453	1.772	1.661	3.433	10	10	20	99,42%
17.	PUTUSSIBAU SELATAN	4.412	4.072	8.484	4.389	4.062	8.451	23	10	33	99,61%

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN									%
		JUMLAH PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN			MEMILIKI			BELUM MEMILIKI			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
18.	KALIS	2.263	2.083	4.346	2.250	2.073	4.323	13	10	23	99,47%
19.	BOYAN TANJUNG	2.459	2.245	4.704	2.449	2.240	4.689	10	5	15	99,68%
20.	MENTEBAH	1.966	1.847	3.813	1.947	1.827	3.774	19	20	39	98,98%
21.	PENGKADAN	1.449	1.367	2.816	1.445	1.362	2.807	4	5	9	99,68%
22.	SUHAIID	1.430	1.404	2.834	1.420	1.394	2.814	10	10	20	99,29%
23.	PURING KENCANA	317	267	584	315	265	580	2	2	4	99,32%
JUMLAH		41.950	39.218	81.168	41.686	38.997	80.683	264	221	485	99,40%

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data Kabupaten Bersih Semester 2 Tahun 2024

Putussibau, 03 Februari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu



USMANDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19670302 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JALAN ANTASARI NO. 07 PUTUSSIBAU 78711
Email: disdukcapil@kapuashulukab.go.id

REKAPILASI KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			MEMILIKI			BELUM MEMILIKI			%
		LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	
1.	PUTUSSIBAU UTARA	14593	14049	28642	9,384	8,863	18247	5209	5186	10395	63.71%
2.	BIKA	2655	2470	5125	1,856	1,675	3531	799	795	1594	68.90%
3.	EMBALOH HILIR	3119	2985	6104	2,074	1,983	4057	1045	1002	2047	66.46%
4.	EMBALOH HULU	2798	2671	5469	2,005	1,818	3823	793	853	1646	69.90%
5.	BUNUT HILIR	4648	4473	9121	3,204	2,999	6203	1444	1474	2918	68.01%
6.	BUNUT HULU	8385	7857	16242	5,057	4,882	9939	3328	2975	6303	61.19%
7.	JONGKONG	5966	5820	11786	3,780	3,578	7358	2186	2242	4428	62.43%
8.	HULU GURUNG	7486	7180	14666	4,580	4,282	8862	2906	2898	5804	60.43%
9.	SELIMBAU	7419	7080	14499	4,501	4,159	8660	2918	2921	5839	59.73%
10.	SEMITAU	5502	5026	10528	3,675	3,299	6974	1827	1727	3554	66.24%
11.	SEBERUANG	6271	5790	12061	3,877	3,525	7402	2394	2265	4659	61.37%
12.	BATANG LUPAR	2890	2833	5723	2,062	1,940	4002	828	893	1721	69.93%
13.	EMPANANG	2168	2011	4179	1,397	1,297	2694	771	714	1485	64.47%
14.	BADAU	3958	3785	7743	2,296	2,278	4574	1662	1507	3169	59.07%
15.	SILAT HILIR	11561	10713	22274	7,308	6,772	14080	4253	3941	8194	63.21%
16.	SILAT HULU	6450	5954	12404	4,007	3,649	7656	2443	2305	4748	61.72%
17.	PUTUSSIBAU SELATAN	13710	13090	26800	8,856	8,317	17173	4854	4773	9627	64.08%
18.	KALIS	7685	7185	14870	4,981	4,440	9421	2704	2745	5449	63.36%
19.	BOYAN TANJUNG	7300	6846	14146	4,567	4,275	8842	2733	2571	5304	62.51%
20.	MENTEBAH	6147	5677	11824	3,900	3,501	7401	2247	2176	4423	62.59%
21.	PENGKADAN	5128	4893	10021	3,065	2,744	5809	2063	2149	4212	57.97%
22.	SUHAID	5221	5051	10272	3,209	3,155	6364	2012	1896	3908	61.95%
23.	PURING KENCANA	1288	1201	2489	815	736	1551	473	465	938	62.31%
JUMLAH		142,348	134,640	276,988	90,456	84,167	174,623	51,892	50,473	102,365	63.04%

Putussibau, Februari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu



USMANDI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 19670302 199703 1 005